

**URGENSI IMPLEMENTASI *TECHPLOMACY* DALAM KEBIJAKAN
LUAR NEGERI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN DI ERA
'THE NEW LEVIATHAN'**

SITI ASTRIYANI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai urgensi kemunculan kekuatan teknologi digital sudah seharusnya diturutsertakan kedalam kebijakan luar negeri suatu negara dengan menerapkan kebijakan *techplomacy* yang berlandaskan konsep dan teori *smart power*, diplomasi digital, dan *techplomacy* itu sendiri.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dilakukan dengan *in depth interview*, analisis dokumen resmi, dan studi pustaka. Penulis menggunakan empat tahapan model analisis interaktif data menurut Miles & Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi data.

Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengikuti langkah Denmark dengan memberlakukan kebijakan *techplomacy* yang sudah disesuaikan dengan model politik luar negeri Indonesia. Berdasarkan peringkat EGDI (*E-Government Development Index*) Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 193 negara dan pada peringkat WDC (*World Digital Competitiveness*) Indonesia berada di peringkat ke-45 secara keseluruhan dari 64 negara, kedua peringkat ini berada jauh dari kedudukan Denmark. Maka dari itu, Indonesia memerlukan beberapa langkah dalam mencapai kebijakan *techplomacy* itu sendiri melalui skema dengan 3 jalur yaitu, jalur percepatan infrastruktur digital. Kemudian, jalur inovasi regulasi, dengan melakukan inovasi pada kebijakan luar negerinya. Terakhir, jalur pemerataan ekosistem ekonomi digital, salah satunya dengan meningkatkan penetrasi internet dan literasi digital.

Kata kunci: *techplomacy*, diplomasi digital, kebijakan luar negeri, Indonesia, Denmark.

**THE URGENCY OF TECHPLOMACY IMPLEMENTATION IN
INDONESIAN FOREIGN POLICY: OPPORTUNITIES AND
CHALLENGES IN THE ERA OF 'THE NEW LEVIATHAN'**

SITI ASTRIYANI

ABSTRACT

This research aims to discuss the urgency of the emergence of the power of digital technology should be included in a country's foreign policy by implementing a techplomacy policy based on the concepts and theories of smart power, digital diplomacy, and techplomacy itself.

The method used is descriptive qualitative using primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews, analysis of official documents, and literature studies. The author uses a four-stage interactive data analysis model according to Miles & Huberman, namely data collection, data reduction, data presentation, and data withdrawal/verification.

The final result of this research shows that Indonesia needs to follow Denmark's steps by enacting a techplomacy policy that has been adapted to Indonesia's foreign policy model. Based on the EGDI (E-Government Development Index) ranking Indonesia ranks 77th out of 193 countries and on the WDC (World Digital Competitiveness) ranking Indonesia is ranked 45th overall out of 64 countries, both of these rankings are far from Denmark's position. Therefore, Indonesia needs several steps in achieving the techplomacy policy itself through a scheme with 3 paths, namely, the digital infrastructure acceleration path. Then, the path of regulatory innovation, by innovating its foreign policy. Finally, the path of equalizing the digital economy ecosystem, one of which is by increasing internet penetration and digital literacy.

Keywords: techplomacy, digital diplomacy, foreign policy, Indonesia, Denmark.